



Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi

<https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>

ISSN: 2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209

Paradigma New Public Management (NPM) sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk *Good Governance* di Indonesia

Alvin Herlandy Lazuardi¹, Wahidahwati²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya^{1,2}
email: alvinherlandy@gmail.com¹

Article Information

History of Article:

Received February 8th 2022

Accepted October 3rd 2022

Published December 20th 2022

DOI:

10.32639/fokbis.v21i2.43



ABSTRAK

Good governance kini telah menjadi kata kunci dalam semua rumusan tujuan reformasi birokrasi pemerintahan sebagai bagian dari transformasi dan pemanfaatan pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia. Sebagai tujuan, tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi terwujudnya otonomi negara bagian dan daerah dan, menurut Gambhir Bhatta (1996), ditandai dengan tingkat akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Didapatkan hasil bahwa persyaratan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik masih termasuk dalam ruang lingkup paradigma ortodoks administrasi baru dalam arti sempit. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa strategi dan kebijakan yang diambil oleh negara dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan terpadu Indonesia memiliki perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai keadaan internal dan eksternal.

Kata kunci: Good Governance, Birokrasi, Reformasi, New Public Management

ABSTRACT

Good governance has now become the key word in all formulations of the objectives of government bureaucratic reform as part of the transformation and utilization of government in the broadest sense in Indonesia. As a goal, good governance is a prerequisite for the realization of state and local autonomy and, according to Gambhir Bhatta (1996), is characterized by a high level of accountability, transparency, openness, and the rule of law. The method used in this research is literature study. Literature study method is a series of activities related to the methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. The results show that the requirements for bureaucratic reform to realize good governance are still included in the scope of the new orthodox administrative paradigm in a narrow sense. On the other hand, it can be said that the strategies and policies adopted by the state and local governments in Indonesia's integrated government system have a broader perspective by taking into account various internal and external circumstances.

Keywords: Good Governance, Bureaucracy, Reform, New Public Management

PENDAHULUAN

Good governance kini telah menjadi kata kunci dalam semua rumusan tujuan reformasi birokrasi pemerintahan sebagai bagian dari transformasi dan pemanfaatan pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia. Sebagai tujuan, tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi terwujudnya otonomi negara bagian dan daerah dan, menurut Gambhir Bhatta (1996), ditandai dengan tingkat akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum yang tinggi.

Di akhir artikel berjudul "New Governance: What to Take and What to Leave" (<http://www.clad.org/ve/ormond.html>, undateable), Derry Ormond dan Elke Loeffler mengutip: Di atas segalanya, dalam menghadapi perubahan saat ini dan perputaran yang tinggi, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk bertanya tentang tantangan yang akan dihadapinya dalam menerapkan tata kelola yang baik. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan sangat baik oleh NeoManajemen Umum, NMP (New Public Administration, disingkat NPM), tetapi tidak lengkap. Menurut penulis, tujuan dari pernyataan ini adalah bahwa, untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik, pemerintah di berbagai negara memiliki alat dan strategi kebijakan, dan struktur konseptual administrasi publik baru, atau pejabat pemerintah baru. (Nigro dan Nigro, 1980; Frederickson, 1984; Shafritz, 1997).

Tulisan ini akan membahas bagaimana respons pemerintah dalam menghadapi berbagai krisis yang muncul dalam lingkungan masyarakat yang telah semakin maju dan berkembang dalam intelektualitas dan aktualitas peranannya dewasa ini. Bagaimana tuntutan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dalam kerangka paradigma New Public Management (NPM) atau Neo-Manajemen Publik atau Administrasi Negara Baru (NMP/ANB) guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance); dimana interaksi antara masyarakat dengan para penyelenggara negara dalam kesetaraan kedudukan berdasarkan konsensus publik yang luas, yang memungkinkan kelompok masyarakat miskin dan marjinal memiliki akses yang lebih terbuka dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Pemerintahan yang baik yang ingin diwujudkan juga diharapkan cukup efektif dan berkeadilan, menghormati dan menegakkan supremasi hukum, serta memiliki kadar transparansi yang lebih baik secara kelembagaan maupun individual aparatur negara dalam interaksi dan transaksi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tulisan ini membahas bagaimana pemerintah menanggapi berbagai krisis di masyarakat yang semakin canggih dan berkembang dalam hal relevansi intelijen dan peran. Bagaimana menerapkan persyaratan reformasi birokrasi dalam paradigma New Governance (NPM), New Governance atau New Governance (NRM/NSA) untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik, memungkinkan kelompok miskin dan terpinggirkan memiliki akses yang lebih terbuka terhadap pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Tata kelola yang baik yang akan dilaksanakan cukup efektif dan adil, menghormati dan menjamin supremasi hukum, dan diharapkan memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi, secara institusional dan individual, oleh badan-badan nasional dalam pemerintahan, pengembangan dan interaksi dan transaksi layanan.

TINJAUAN LITERATUR

Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam buku Satuan Negara Republik Indonesia (SANKRI), Lembaga Administrasi Negara meresmikan bahwa pemerintahan yang baik termasuk langsung atau tidak langsung dalam nilai-nilai pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut: Supremasi Hukum, Keadilan, Kesetaraan, Transparansi, Partisipasi, Desentralisasi, Integrasi, Profesionalisme, Efisiensi, Efektivitas dan Efisiensi, Daya Saing dan Akuntabilitas (LANRI, 2003: 25). Sementara itu, pada

Musyawarah Nasional Indonesia tentang Pengelolaan Daerah yang Baik pada bulan Oktober 2001, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dalam konteks pemerintahan daerah, seluruh anggota asosiasi menyepakati sepuluh prinsip pemerintahan daerah yang baik. Pemerintah Otonomi Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Republik Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Indonesia (ADEKSI) mengandung prinsip-prinsip berikut:

Prinsip Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

1. Prinsip Penegakan Hukum: Menjamin penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
2. Prinsip Transparansi: Membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan memudahkan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.
3. Prinsip Kesetaraan: Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
4. Prinsip Respons: Meningkatkan kepekaan pejabat publik terhadap aspirasi rakyat tanpa kecuali.
5. Prinsip Prediktif: Mengembangkan suatu wilayah berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas, dan melibatkan warga (secara aktif dan aktif) dalam proses pembangunan secara keseluruhan sehingga warga merasa bertanggung jawab atas pembangunan wilayah tersebut.
6. Prinsip Tanggung Jawab: Memperkuat akuntabilitas para pengambil keputusan di semua bidang yang berdampak pada masyarakat luas.
7. Prinsip Pengawasan: Memperkuat upaya untuk mengawasi pemerintahan dan pemerintahan pembangunan, dan mencari keterlibatan sektor swasta dan masyarakat yang lebih luas.
8. Efektivitas dan Efektivitas Prinsip: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
9. Prinsip Profesionalisme: Meningkatkan Keterampilan dan Moral Aparatur Pemerintah Kami dapat memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, akurat dan terjangkau.

Dengan demikian, pemerintahan yang baik atau *good governance* sesungguhnya merupakan varian positif dari konsepsi pemerintahan atau *governance*². Konsepsi *governance* didefinisikan oleh Kooiman (eds, 1993, sebagaimana dikutip oleh Desi Fernanda, 2003) dengan pengertian: serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma New Public Management: Neo-Ortodoksi Administrasi Negara

New Public Management (NPM) sebenarnya mencari ahli pemerintahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju dan berkembang sebagai akibat dari berbagai krisis yang melanda negara-negara yang terlibat. Para ahli ini umumnya tidak puas dengan kerangka tradisional atau ortodoks alat dan pendekatan ilmiah dalam administrasi publik yang terbukti tidak efektif dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan eksternal yang dihadapi pemerintah dalam melayani masyarakat. Tantangan ini kemudian akan dijawab dalam paradigma administrasi baru yang disebut Neo Management Public atau New State Administration

Saat ini, sebagai paradigma NMP/ANB, dapat dikatakan bahwa itu adalah struktur pemikiran administrasi yang sama sekali tidak baru, dan dengan demikian menentang keberadaan nilai-nilai klasik (ortodoks) dan teori negara. Dikelola dengan nilai dan ide yang dikembangkan di AMP/ANB. Di sisi lain, menurut penulis, NMP/ANB sebenarnya merupakan "respon terhadap aspirasi publik" (response publik) dalam konteks yang lebih luas dan lebih liberal, dan paradigma administrasi publik yang lebih tua yang berfokus pada administrasi publik dan efektivitas internal pemerintah dalam mencapai tujuannya No (Frederickson, 1984:122). Namun, seperti yang ditulis Derry Ormond dan Elke Loeffler, "Kita harus ... [] meninggalkan gagasan untuk menodai dogma, model, dan prasangka pemerintah yang ada dan yang baru." Penulis menyebut perspektif dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh NMP/ANB sebagai paradigma baru administrasi dalam arti ortodoksi baru administrasi (Fernanda, 2000). Memang, seperti yang dikatakan Ormond dan Loeffler, "Jenis pemerintahan 'pemerintah baru' benar-benar tidak ada seperti yang dilakukan oleh pemerintah Weber dalam bentuk idealnya." Bahkan jika ada perbedaan antara kedua pandangan, antara Ortodoks dan Ortodoks Baru dalam administrasi terletak hanya pada alat yang berbeda yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berbeda pada waktu yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda.

Nilai-nilai dan administrator Ortodoks dikembangkan pada tahap awal pengembangan ilmiah dengan memecahkan masalah hubungan antara negara, masyarakat, dan warga negara pada tingkat aspirasi dan tuntutan sederhana. Di sisi lain, nilai dan administrator neo-ortodoks berkembang selama periode administrasi publik yang maju. Berkaitan dengan itu, administrasi pemerintahan baru menangani masalah hubungan antara negara dan masyarakat yang dikembangkan dengan pemikiran dan aspirasi yang lebih kritis yang melampaui pelaksanaan kehidupan dasar yang sederhana. Dengan kata lain, perlu diwujudkan peran yang lebih aktif dalam interaksi dengan negara. Selain itu, ortodoksi tata kelola baru yang dimasukkan dalam paradigma AMP/ANB sebenarnya merupakan respon terhadap berbagai krisis yang belum pernah dihadapi oleh semua negara yang telah mengembangkan New Governance Paradigm Framework (AMP/ANB) sebelumnya.

Dengan kata lain, formula dan alat yang berbeda akan dikembangkan untuk negara yang berbeda tergantung pada tingkat neo-ortodoksisme dalam administrasi yang dirancang sebagai basis strategis dan politik untuk reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Krisis atau masalah strategis. Dia bertemu di masyarakat postmodern saat ini. Tantangan pembangunan dan lingkungan strategis yang dihadapi banyak negara, khususnya negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur, antara lain :

1. Karena kurangnya kebijakan publik terkait krisis dan masalah yang muncul, pemerintah tidak memiliki perangkat untuk menangani masalah tersebut.
2. Keterbatasan sumber daya nasional berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Keterbatasan kemampuan negara untuk mengembangkan lembaga dan administrasi nasional

4. Dalam menghadapi tuntutan pemerintah untuk memusatkan berbagai aspek administrasi ada kebutuhan untuk memperluas kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.
5. Dampak perubahan nilai pada sistem administrasi publik, baik internal maupun eksternal; dan keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi dampak globalisasi dan peningkatan daya saing nasional dalam menghadapi dinamika global yang tidak dapat diprediksi;
6. Dampak dari perubahan yang cepat dan kemajuan teknologi ini, terutama dalam arus informasi, telah menjadi tantangan bagi sistem pemerintahan untuk menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan yang telah berlangsung lama. Tekanan masalah yang dihadapi berbagai negara tersebut di atas harus disikapi dengan memikirkan kembali cara berpikir mereka, serta merevisi sistem dan struktur pemerintahan mereka, mekanisme dan struktur kekuasaan mereka serta pengambilan keputusan politik mereka. Bagaimana pemerintah dan lembaga diatur, dan bagaimana kebijakan dan strategi dapat diadopsi untuk membawa reformasi yang diperlukan.

Dengan tujuan penulisan jurnal ini untuk mengusulkan dan mengeksplorasi bagaimana paradigma baru administrasi, yaitu neo-ortodoksisme dalam administrasi, dapat menjadi kerangka politik dan strategi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dua paradigma pandangan yang berbeda diajukan. akan hadir dibahas. Ormond dan Loeffler (<http://www.clad.org.ve/ormond.html>) mengungkapkan dua pandangan yang berbeda tentang konsep NPM/NMP/ANB sebagai berikut: Pertama, pemahaman sempit melihat NPM/NMP/ANB sebagai penyatuan dua aliran pemikiran dan gagasan yang berbeda (Hood, 1991: 5). Aliran pemikiran pertama datang dari perspektif ekonomi institusional baru, yang membahas prinsip-prinsip administrasi baru seperti permusuhan, pilihan pengguna, transparansi, dan pendekatan penataan insentif. Sedangkan pemikiran kedua didasarkan pada pandangan NPM/NMP/ANB dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis pada sistem dan praktik administrasi publik.

Dalam pandangan Hood (1991) yang dikutip oleh Ormond dan Loeffler di atas, jelas bahwa pilihan bangunan tata pemerintahan yang baik berada dalam aliran pemikiran pertama dalam klasifikasi mazhab NPM/NMP/ANB. Konsep reformasi birokrasi dipromosikan oleh David Osborne dan Ted Geibler dalam buku mereka tahun 1992, *New Invention of Government: Bagaimana Semangat Kewirausahaan Mengubah Birokrasi*, tetapi tampaknya jatuh ke dalam aliran pemikiran kedua dalam kategori ini, termasuk: Model untuk Implementasi Sistem Akuntansi, Model T Keuangan Publik, Manajemen Berbasis Hasil, Manajemen Kontrak, Manajemen Risiko, Manajemen Sumber Daya, Biaya Pengguna, dan lainnya. Cara berpikir kedua NPM/NMP/ANB tidak melihat paradigma ini dari sudut pandang filosofis, melainkan sebagai pendekatan yang lebih pragmatis dari sudut pandang yang lebih luas, melainkan tekanan dan tuntutan yang berbeda dari pemerintah, logis dan praktis. Dalam konteks globalisasi yang berkembang saat ini, ada kecenderungan untuk mengembangkan kebutuhan yang sama di negara yang berbeda dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan hukum yang berbeda. Pastikan bahwa kepentingan diselaraskan untuk memperkenalkan perubahan atau reformasi dalam administrasi publik. Namun, adanya konvergensi tersebut tidak berarti adanya kesatuan arah, tujuan, strategi, dan kebijakan reformasi administrasi di negara yang bersangkutan.

Hal ini disebabkan oleh kondisi internal masing-masing negara, dan tingkat keparahan masalah dan krisis yang mereka hadapi sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Misalnya, jika kepentingan hutan alam sebagai paru-paru dunia menyatu untuk mencegah percepatan efek rumah kaca akibat pemanasan global, maka akan mengarah pada konservasi sumber daya hutan berupa penghentian penebangan. . . . Masalahnya, negara seperti Indonesia sebenarnya masih mengandalkan hutan sebagai sumber devisa dan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Haruskah Indonesia melarang deforestasi sembrono, yang berlanjut hingga hari ini, sejalan dengan standar pengelolaan hutan lestari dan segera mereformasi administrasinya? Sejauh mana reformasi ini akan mempengaruhi negara kita? Kompensasi apa yang dapat diberikan oleh negara yang berkepentingan atas hilangnya sumber daya administratif nasional?

Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Tentang Industri Tembakau dan Tembakau di Indonesia adalah kasus yang menjadi perhatian dunia untuk mencegah risiko kanker dan kematian akibat merokok tembakau. Berapa banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan di industri tembakau dan tembakau, dan berapa banyak penerimaan cukai pemerintah yang akan hilang karena kebijakan yang membatasi atau menghapuskan industri tembakau di Indonesia? Tentu saja, gagasan penerapan reformasi akuntabilitas berbasis kinerja dalam pemerintahan Indonesia tidak harus sama dengan kebijakan reformasi Amerika Serikat atau Inggris. Demokratisasi yang diproklamkan oleh sistem kekuasaan negara AS untuk banyak negara Dunia Ketiga dan digunakan sebagai alat kebijakan AS untuk mendukung negara-negara tersebut tidak dapat diterapkan di AS pada saat itu. Negara berkembang tentunya harus melakukan berbagai penyesuaian tergantung pada kondisi objektif yang dihadapinya dalam sistem pemerintahannya. Sebaliknya, seperti halnya di Indonesia, berbagai lembaga negara independen yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil terasa seperti negara dalam negara, dan pemerintah tidak dapat membentuk dan mengawasi peraturan perundang-undangan. Lembaga-lembaga tersebut akan segera menilai campur tangan pemerintah (eksekutif) terhadap kemandirian negara dan peran lembaga terkait.

Masalah ini tidak serta merta menghambat partisipasi Indonesia dalam arus reformasi administrasi global, tetapi ditempuh dengan melakukan berbagai penyesuaian yang logis dan rasional serta memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas. Ini merupakan teknik reformasi administrasi berdasarkan sudut pandang kedua, yang mengharapkan pemerintah memiliki kemampuan yang optimal untuk merespon berbagai tekanan dan tuntutan yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Membangun di atas, terutama yang berkaitan dengan aspek kedua dari paradigma NPM/IMP/NSA sebagai administrasi neo-ortodoks; Dalam arti yang lebih luas, diharapkan pemerintah mampu secara adaptif dan inovatif menetapkan strategi dan kebijakan reformasi birokrasi dan administrasi, memiliki nilai praktis yang tepat, dan meminimalkan risiko yang dihasilkan dari hasil kebijakan. Hal ini diputuskan. Sehubungan dengan itu, tren reformasi yang dilakukan di masing-masing negara, berdasarkan pengalaman berbagai negara anggota OECD, sesuai dengan kondisi sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial masing-masing negara, antara lain:

1. Ini mentransfer kekuasaan negara ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pelaksanaan administrasi publik berdasarkan kekuasaan yang didesentralisasi. Memastikan akuntabilitas dan produktivitas melalui reformasi pemantauan dan akuntabilitas. Organisasi layanan publik yang lebih responsif terhadap masyarakat, termasuk pengembangan model kompetitif dalam pemberian layanan publik dan pengembangan pilihan publik yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
2. Kelompok pengguna, piagam sipil, dll. Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia - Dari Kepemilikan Seumur Hidup hingga Hasil dan Manfaat Kontrak. Reformasi sistem hukum dan kualitas hukum untuk lebih mengurangi campur tangan negara dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengatur kehidupan mereka; Memperkuat fungsi kontrol (pengelolaan) instansi pemerintah pusat.

Berbagai Contoh Tren Reformasi Birokrasi di Negara-negara OECD Selain itu, dari segi cakupan dan intensitas, agenda reformasi yang diterapkan di Indonesia semakin berkembang. Indonesia harus mengambil sudut pandang kedua ketika menerapkan paradigma NPM/NPM/NSA. Namun perlu ditegaskan sekali lagi bahwa struktur reformasi birokrasi yang didasarkan pada paradigma NPM/NMP/ANB tersebut sebenarnya harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat cermat terhadap berbagai kondisi yang berlaku di Indonesia. Di awal artikel ini, Derry Ormond dan Elke Loeffler berkata: "Pemerintah baru hanya akan dapat menawarkan beberapa jawaban terbaik," katanya. Namun, tidak ada satu solusi terbaik yang dapat diusulkan untuk reformasi birokrasi, dan ada banyak alternatif untuk dipilih tergantung pada keadaan dan kebutuhan aktual.

Implikasi Bagi Reformasi Birokrasi Di Indonesia

Istilah Reformasi telah menjadi kata kunci dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sejak sistem Orde Baru dipimpin oleh Presiden Suharto yang “meninggalkan Capraban” pada Mei 1998. Terminologi ini mencerminkan komitmen nasional terhadap tuntutan aspirasi masyarakat yang diungkapkan oleh mahasiswa gerakan reformasi global dan berbagai pemimpin reformasi dalam menanggapi krisis multidimensi yang melanda negara kita pada tahun 1997/1998. Dalam konteks global, dampak negatif dari krisis multidimensi tersebut telah menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya ke level yang relatif rendah. Selain itu, krisis yang terjadi saat ini tampaknya terkait erat dengan temuan lembaga penelitian internasional, yang sebenarnya merupakan salah satu negara terkorup di dunia: Indonesia.

Namun, sejarah mencatat bahwa birokrasi pemerintah (kegagalan negara) telah gagal mengembangkan kebijakan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah sosial, ekonomi, hukum dan peradilan, politik dan keamanan nasional. Jelas, hal ini sebagian besar disebabkan oleh sifat dan produktivitas lembaga birokrasi yang penuh dengan penyakit birokrasi (patologi birokrasi) dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mekanisme pengelolaan ketatanegaraan itu sendiri. Sementara itu, sistem pasar (market failure) tidak mampu menyediakan barang, jasa dan kesempatan kerja, serta laju pertumbuhan ekonomi dan pasar uang dan modal terus tumbuh secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh sifat pelaku pasar domestik, yang terlibat dalam perilaku oportunistik yang hanya mencari keuntungan sementara, mengabaikan konsumen yang miskin dan terpengaruh.

Keadaan ini justru mengakibatkan kekacauan dalam sistem pemerintahan (kekacauan institusional), kekacauan sosial (social chaos), kekacauan ekonomi pasar (market economy disparity), dan bahkan kekacauan politik nasional (political chaos).) pada masa lalu yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1997/99.

Namun, di sisi lain, kegagalan tersebut di atas justru melahirkan kekuatan baru, yakni masyarakat sipil, dalam sistem ekonomi nasional sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan dengan pemerintahan negara. pergerakan. Hal ini menjadi faktor penting yang mendorong munculnya seruan reformasi menyeluruh di segala bidang, terutama dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan latar belakang masalah negara-bangsa, pemerintah Indonesia di era reformasi ini tidak punya pilihan selain fokus pada reformasi birokrasi. dan mekanisme penyelenggaraan administrasi publik secara lebih sistematis, inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, di era reformasi ini, pemerintah Indonesia bersama seluruh rakyat Indonesia telah sepakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan afiliasi.

Berbagai langkah kebijakan strategis untuk mereformasi administrasi publik dan pemerintahan daerah menjadi sistem administrasi terpadu telah diambil secara mendasar, sistematis, komprehensif dan berkelanjutan. Susunan negara, pemerintahan, dan masyarakat Indonesia secara konstitusional berubah sebagai akibat dari Amandemen I-IV UUD 1945. Sistem sentralisasi ditata ulang berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tahun 1999 diubah dan diperjelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 25. Pada tanggal 32 dan 33 tahun 2004 Di bidang hukum dan peradilan, independensi peradilan dan peradilan diperkuat melalui reformasi di bidang hukum dan peradilan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, upaya penegakan hukum dan pemberantasan KKN juga terus berkembang untuk membentuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas KKN, taat, bersih, dan taat hukum. Sementara itu, reformasi politik ditandai dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan di bawah pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia melalui peran dan keanggotaan berbagai komite independen seperti Komnas HAM. ,

Komisi Pemilihan Umum (CPU), Komisi Hukum Nasional (KHN). dll. Memang, pada tahun 2004, rakyat Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum yang jauh lebih demokratis berdasarkan sistem multi-partai untuk pemilihan legislatif, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara-bangsa, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia diselenggarakan dalam pemilihan umum langsung. Reformasi ini juga didukung oleh berbagai perubahan sistemik di bidang perencanaan pembangunan, manajemen keuangan publik, pengawasan manajemen dan akuntabilitas hasil, manajemen sumber daya manusia, struktur organisasi dan hubungan antara negara dan lembaga pemerintah, dan manajemen pelayanan publik. Semuanya bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik tanpa KKN. Fenomena reformasi administrasi mencakup semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam arti yang sangat luas, dan dalam arti sempit, yaitu sekadar reformasi birokrasi di dalam tubuh administrasi administrasi dan pemerintah daerah Indonesia saat ini. Secara paradigma dan metodologis dapat dikatakan sangat berbeda dengan berbagai kebijakan dan program reformasi administrasi di masa orde lama dan orde baru. Pada era orde lama tahun reformasi birokrasi dilakukan pada tataran yang relatif sederhana dan mendasar. Dengan kata lain, untuk memperkenalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pengetahuan, dan prinsip-prinsip dan metodologi administrasi di negara-negara maju dengan mengirimkan pejabat publik dan profesor universitas. Apalagi saat kuliah di Amerika. Amerika Serikat.

Kembali pada tahun 1960-an, Perdana Menteri Juanda mengundang delegasi AS untuk melakukan penelitian tentang reformasi pemerintah Indonesia (Miftah Thoha, 2001: 45). Berbagai ilmu dan pengetahuan yang dibawa ke Indonesia oleh siswa yang ditugaskan dikembangkan dan diterapkan di Indonesia sebagai alternatif sistem pemerintahan warisan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang yang masih digunakan pada saat itu. Sementara itu, di era orde baru, upaya reformasi administrasi dilakukan melalui pengembangan dan modernisasi (atau westernisasi) berbagai lembaga dan sistem manajemen atau manajemen sektor publik. Kebijakan reformasi administrasi bertujuan untuk menyusun model dan prinsip penyelenggaraan departemen/lembaga pemerintah. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem pengawasan; Sistem manajemen sumber daya manusia dan program peningkatan kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan; Penataan sistem pengelolaan daerah menurut prinsip desentralisasi, desentralisasi dan co-management. Sistem Pengelolaan Kas Negara, yang meliputi mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan negara; Namun, reformasi sistem administrasi di era orde baru masih dibatasi tidak hanya oleh sistem ideologi birokrasi tetapi juga oleh sistem nilai, norma, dan prinsip administrasi.

Demokratisasi Administrasi Negara RI Dalam Perspektif NPM

Pencapaian besar negara Indonesia pasca Orde Baru adalah demokratisasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Tiga pilihan terakhir yang diambil pada tahun 2004 dengan cara yang sangat demokratis, tertib dan aman hanyalah salah satu indikator keberhasilan ini. Namun, produk dari kesuksesan ini, S.B. Yudhoyono, Yusuf Kalla, dan Eko Prasoso, dalam artikel di harian Kompas (14/10), khawatir akan terjadi pemisahan kekuasaan yang memaksimalkan kepentingan elit dan golongan. Sebuah ekspresi politik dan formatif yang akan membingungkan publik.

Prasoso melihat elit politik saat ini cenderung melupakan pentingnya pengelolaan pembangunan dan pembangunan administrasi dan lebih memperhatikan pembangunan ekonomi, hukum, sosial dan politik. Maka dari itu, makalah yang disusun oleh Prasoso mengeksplorasi solusi bagaimana administrasi nasional yang kuat dapat mendukung pemerintahan yang berkuasa. Ketika saya menulis tesis ini, saya sepertinya lupa bahwa paradigma yang berkembang dari tahun 1990-an hingga 2000-an dalam konteks pembangunan nasional dan administrasi menjauh dari gagasan memberdayakan cabang eksekutif. Seperti yang dipikirkan terakhir oleh Fred Riggs, ini memberdayakan orang untuk menjadi mitra dalam administrasi publik. Adalah menyesatkan bila dikatakan bahwa reformasi birokrasi Indonesia tidak memiliki visi, gila dan begitu sporadis sehingga berbagai kasus KKN dan berbagai bentuk birokrasi tercermin dalam profil pejabat pemerintah Indonesia. "Hingga saat ini dalam rangka reformasi birokrasi, kita belum melihat bentuk dan/atau grand design yang diinginkan, dan tidak ada kemauan politik dari pemerintah," kata Prasoso.

Padahal, jika dicermati, berbagai dokumen pemerintah termasuk Dekrit Republik Rakyat Mongolia, UUD 1945 dan perubahannya, berbagai undang-undang, dan berbagai undang-undang lainnya dikeluarkan dan dilaksanakan di era reformasi ini. Anda akan melihat bahwa apa yang dimaksud dengan skema besar reformasi birokrasi di Indonesia sebenarnya adalah demokratisasi pemerintahan sebagai tanda pergeseran paradigma dari *government to government*. Perubahan-perubahan tersebut bukan akibat 'dumping' model-model yang dikembangkan di luar negeri, melainkan melalui fase adaptasi untuk mencerminkan keunikan aspek reformasi Indonesia sejalan dengan ungkapan 'think global, act local'.

Dalam konteks ini, LAN terus melakukan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pasca pemerintahan Orde Baru. Perkembangan global reformasi birokrasi pemerintahan yang berlandaskan paradigma *good governance* dan strategi untuk memikirkan kembali pemerintah sebenarnya menjadi prioritas LAN Initiative untuk beradaptasi secara konseptual, sistematis dan holistik terhadap proyek-proyek pembangunan skala besar dengan kantor MENPAN sejak awal 1990-an. pernah . Sebutkan perangkat seperti yang ditunjukkan dalam dokumentasi Repelita di bidang penggunaan perangkat. Konsep inilah yang mengawali proses reformasi pemerintahan Indonesia sejak pergantian tahun 1998/1999. Memang benar, reformasi administrasi mencapai puncaknya pada tahun pada masa transisi dari era Orde Baru di bawah Suharto ke era reformasi, dari pemerintahan Habibie dan Gusdur ke Presiden Megawati. Hal ini ditandai dengan berbagai reformasi. Tahapan di bidang hukum dan perundang-undangan, antara lain Perubahan UUD 1945, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi daerah, perimbangan kekuasaan antar lembaga negara, netralisasi birokrasi, pemisahan, peningkatan dan pemberdayaan antar TNI dan sistem pemilihan langsung Polri Keterlibatan masyarakat dan kelompok sosial dalam administrasi publik dan proses administrasi publik untuk mengubah mekanisme suksesi lembaga nasional, termasuk kepemimpinan nasional melalui.

Berbagai kasus KKN yang terjadi saat ini harus ditangani dan dipelajari secara proporsional. Secara pribadi, saya pikir saya harus jujur tentang fakta bahwa kasus korupsi terbesar sebenarnya tidak dilakukan oleh birokrat atau pejabat publik. Korupsi kelas pada paus adalah nyata dan dilakukan oleh anggota masyarakat sipil, sektor swasta, struktur komersial nasional dan elit politik Indonesia.

Namun, harus juga diakui bahwa keberhasilan pengelolaan korupsi besar sebenarnya tidak didorong oleh rayuan kekayaan para koruptor besar, tetapi didukung atau dibantu oleh Apartur yang tergoda. Tetapi kita juga tahu bahwa perangkat birokrasilah yang akhirnya menjadi korban dari individu yang korup itu sendiri, sementara tampaknya menghindari hukum dan membiarkan uang korup bergerak bebas ke seluruh negeri atau ke luar negeri. Kadang-kadang citra buruk dari mereka yang menyusup ke badan-badan pemerintah birokrasi Indonesia tetap ada.

Apakah ini berarti reformasi birokrasi untuk menjamin *good and clean governance* telah kehilangan visinya atau tidak memiliki *grand strategy*? Disinilah letak kesalahan dan kesalah pahaman yang melekat pada sebagian masyarakat, terutama para elit masyarakat yang selalu mendahulukan aparaturnya pemerintah pusat dan daerah. Tidak adil menilai negara ini seolah-olah tidak ada unsur itikad baik yang diungkapkan dalam lembaga administrasi nasional. Bahkan, banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengubah sistem dan prosedur kerja dengan berbagai cara, seperti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pendampingan. Kata kunci untuk mengatasi keraguan terhadap lembaga negara dan memulihkan kepercayaan masyarakat adalah akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Untuk memastikan demokratisasi administrasi diwujudkan melalui akuntabilitas publik dan partisipasi publik, masyarakat diberi ruang hukum untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan, implementasi bahkan pengawasan administratif.

Dalam sistem pemerintahan kita saat ini, kita melihat unsur-unsur komunitas organisasi non-pemerintah yang berpartisipasi di berbagai instansi pemerintah seperti KPU/KPUD, Komnas HAM, KHN, KPK, dll. Belum lagi mereka yang secara teknis terlibat langsung dalam proses pembangunan administratif seperti program pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Kami juga melihat Presiden Habibie dan Abdurrahman Wachid mengundurkan diri

karena tanggung jawab publik mereka ditolak oleh DPR dan MPR. Bahkan kekalahan Megawati dalam pemilihan presiden lalu dipandang sebagai sanksi publik, dan pemerintah Megawati tidak lagi dimintai pertanggungjawaban.

Harus diyakini bahwa JK, yang dipilih langsung oleh rakyat, bertanggung jawab untuk melaksanakan program demokratisasi administratif. Kami berharap dalam lima tahun ke depan, JK dapat mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut: Pertama, kami melanjutkan komitmen kami untuk reformasi nasional untuk semua bidang. Kedua, kemampuan membentuk kabinet dengan komposisi berimbang dari beragam kepentingan yang terbukti mampu mendukung reformasi administrasi dan demokratisasi. Ketiga, mengembangkan kebijakan publik yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keempat, pengembangan sistem kelembagaan birokrasi yang demokratis, bertanggung jawab, profesional dan responsif. Terakhir, kembangkan sistem penegakan, remunerasi dan saksi yang jelas, kuat dan konsisten.

SIMPULAN

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa persyaratan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik masih termasuk dalam ruang lingkup paradigma ortodoks administrasi baru dalam arti sempit. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa strategi dan kebijakan yang diambil oleh negara dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan terpadu Indonesia memiliki perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai keadaan internal dan eksternal. Proses reformasi di Indonesia saat ini terus bercampur dengan pro dan kontra dan harus dilihat sebagai proses yang adaptif dan pragmatis, meskipun ada keraguan tentang penerimaannya oleh lembaga negara, kalangan bisnis dan masyarakat sipil.

REFERENSI

- Azhari, E. T. & Desi, F. (2011). *Modul Diklatpim Tingkat III, Membangun Kepemerintahan Yang Baik*. Jakarta: LANRI.
- Bhatta, G. (1996). Capacity Building At The Local Level For Effective Governance: Empowerment Without Capacity Is Meaningless. In *International Conference on Governance Innovations*. Manila. Philippines.
- GTZ, (2012). Capacity Building Need Assessments in the Regions – Process Guideline Selected Tools and Instruments, (Version 0.0), Annex C, GTZ, Jakarta Japan Association For Civil Service Training and Education, “How To Win Public Confidence As Government Officials”: 100 Sheets For Effective And Efficient Public Administration. LAN-BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta
- Kooiman, J. (2013). *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. London: Sage Publications
- McKinney, J. B., & Lawrence, C. H. (2019). *Public Administration: Balancing Power and Accountability*, Oak Park, Illinois: Moore Publishing Company, Inc.
- Mustopadjaja, A. R. (1997). Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi. *dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, 1(1).
- Mustopadjaja, A. R., & Fernanda, D. (1999). Manajemen Pembangunan Nasional: Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. *Makalah disampaikan pada Suskomsos TNI-TA, 2000*.
- Ormond, D. & Elke, L. (2012) New Public Management: What To Take And What To Leave, available online at <http://www.clad.org.ve/ormond.html>